

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024

Anandita Azzahra*, Ridwan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*ananditaazr@gmail.com

Abstract

Voter participation is a key element in the implementation of elections and is a benchmark for ideal democracy. However, fluctuating voter participation rates demand effective strategies from election organizers. This study aims to analyze and describe the strategies implemented by the South Jakarta City General Elections Commission (KPU) to increase voter participation in the 2024 Election. The research method used is descriptive qualitative, utilizing primary data sources from field research (interviews and observations) and secondary data in the form of a literature review. Data analysis uses Peter Schroder's theory of political strategy, which divides them into offensive and defensive strategies. The results of this study indicate that the offensive and defensive strategies implemented by the South Jakarta City KPU are effective in increasing voter participation, particularly through education-based communication strategies and digital media. The offensive strategy is realized through face-to-face socialization, the use of social media, and the dissemination of information through various media. Meanwhile, defensive strategies are implemented through cross-institutional coordination and collaboration, including educational and government institutions to maintain public trust. The synergy of these two strategies has succeeded in making South Jakarta the highest voter participation rate in DKI Jakarta Province. The South Jakarta City KPU has succeeded not only in increasing participation quantitatively but also creating a participatory and sustainable democratic system.

Keywords: *KPU; Election Implementation; Political Participation; Political Strategy; Simultaneous Election 2024*

Abstrak

Partisipasi pemilih merupakan satu kunci penting dalam pelaksanaan pemilu dan menjadi tolak ukur demokrasi yang ideal. Namun, tingkat partisipasi pemilih yang fluktuatif menuntut strategi efektif dari para penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dari hasil penelitian lapangan (wawancara dan observasi), serta data sekunder berupa tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan teori strategi politik oleh Peter Schroder yang membagi ke dalam strategi ofensif dan defensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ofensif dan defensif yang diterapkan oleh KPU Kota Jakarta Selatan efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya melalui strategi komunikasi berbasis edukasi dan media digital. Strategi ofensif diwujudkan melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, serta penyebaran informasi melalui berbagai media. Sementara itu, strategi defensif diwujudkan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik. Sinergi kedua strategi ini berhasil menjadikan Jakarta Selatan dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di

Provinsi DKI Jakarta, dimana KPU Kota Jakarta Selatan tidak hanya berhasil meningkatkan partisipasi secara kuantitatif tetapi juga menciptakan ekosistem demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: KPU; Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi Politik; Strategi Politik; Pemilu Serentak 2024

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan pers dan media, hak yang sama bagi setiap warga negara, serta pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dapat diartikan sebagai praktik politik yang dapat membentuk suatu pemerintahan, serta menjadi arena bagi rakyat untuk berinteraksi dan berpartisipasi. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, hingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut Lipset dan Rokkan terdapat tiga unsur utama dalam pemilu diantaranya warga negara yang memilih, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan (Labolo, M., & Ilham, 2015). Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan pemilu, dimana tingkat partisipasi akan menjadi tolak ukur demokrasi yang ideal. Partisipasi politik sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan aktif individu ataupun kelompok untuk turut andil dalam proses politik melalui beberapa cara seperti memberikan suara dalam pemilu hingga terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiarjo, 2008).

Dalam praktiknya, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia masih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan data KPU RI, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia pada pemilu tahun 2019 mencapai sekitar 80% sementara pada pemilu tahun 2024 meningkat menjadi 82%. kenaikan ini menunjukkan bahwa secara umum kesadaran politik masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya semakin membaik. Namun meski terjadi peningkatan secara nasional, terdapat beberapa perbedaan signifikan terkait tingkat partisipasi pemilih antarwilayah terutama di daerah perkotaan dengan karakteristik demografis yang kompleks seperti DKI Jakarta.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Tingkat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu Tahun 2019-2024

Tahun	Tingkat Nasional			Provinsi DKI Jakarta		
	DPR	DPD	Pilpres	DPR	DPD	Pilpres
2019	78,74%	78,74%	82%	78,41%	78,49%	79,28%
2024	81,42%	81,36%	81,78%	77,57%	77,65%	78,78%

(Sumber diolah dari kpu.go.id)

Berdasarkan data di atas, secara nasional tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan DPR RI dan DPD pada Pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019, sementara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sedikit mengalami penurunan sekitar 0,22%. Sebaliknya, pada tingkat Provinsi DKI Jakarta terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih baik pada pemilihan DPR RI, DPD, hingga Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tren nasional dan tren lokal di DKI Jakarta yang menegaskan pentingnya keberadaan KPU di tingkat kota dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah lainnya dalam menghadapi pemilu. Hal ini terutama terkait kepadatan penduduk, keragaman masyarakatnya, hingga intensitas aktivitas politik yang tinggi sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi sangat rawan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Terbukti dengan tingkat kerawanan DKI Jakarta yang mencapai skor 88,95 berdasarkan data hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 (Bogja, Suhenti, Puadi, Hariyono, & Malonda, 2023). IKP menjadi alat penting dalam menganalisis dan memetakan potensi gangguan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, dimana partisipasi pemilih pemula dan kelompok muda masih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, serta pengaruh disinformasi digital yang seringkali membuat masyarakat kurang aktif dalam proses politik. Pemilu tahun 2024 di DKI Jakarta sudah seharusnya menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya. Selain angka partisipasi pemilih yang harus meningkat, juga mengenai kualitas memilih harus ditingkatkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mampu mengubah nasib bangsa kedepannya. KPU di tingkat Provinsi hingga kota bersama komponen politik lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan titik balik itu terwujud. Di DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilih di tiap kota administrasi dalam pemilu tahun 2024 dapat dilihat melalui penjelasan di bawah ini.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pada Pemilu Tahun 2019-2024

Kota Adm.	Pemilu 2019				Pemilu 2024			
	DPR	DPRD	DPD	Pilpres	DPR	DPRD	DPD	Pilpres
Jakarta Timur	79,85%	79,8%	80%	80,5%	80,3%	80%	80,4%	81%
Jakarta Barat	79,5%	79,4%	79,4%	80%	77,2%	77,1%	77,2%	78,2%
Jakarta Selatan	78,5%	78,4%	78,5%	79,65%	81,3%	81,3%	81,4%	83,3%
Jakarta Pusat	76,9%	76,9%	77,1%	78%	74,8%	74,7%	75,1%	77%
Jakarta Utara	76%	75,9%	76%	76,5%	74%	73,6%	74%	74%
Kep. Seribu	75,1%	74,8%	76,6%	82%	79%	79,2%	80%	84,7%

Berdasarkan data di atas, terdapat tiga kota administrasi yang mengalami peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yakni Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu sementara tiga kota administrasi lainnya mengalami penurunan. Dalam hal ini, tingkat partisipasi masyarakat kota Jakarta Selatan pada Pemilu serentak tahun 2019 dan 2024 dapat dikomparasikan dengan kota administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Pada pemilu tahun 2024 Jakarta Selatan mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Terlihat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Jakarta Selatan mencapai angka partisipasi sebesar 83,3% naik sekitar 3,65%, kemudian pada pemilihan DPR RI angka partisipasinya sebesar 81,3% naik sekitar 2,8%, pada pemilihan DPRD DKI Jakarta angka partisipasinya sebesar 81,3% naik sekitar 2,9%, serta pada pemilihan DPD DKI Jakarta angka partisipasinya sebesar 81,4% naik sekitar 2,9%. Dengan hasil tersebut, tingkat partisipasi masyarakat Kota Jakarta Selatan naik secara signifikan dan menjadikan partisipasi masyarakatnya menjadi yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu tahun 2024.

Kondisi partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta tentunya patut untuk diapresiasi dan menjadi bukti keberhasilan Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena wilayah Jakarta Selatan yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang relatif tinggi, serta dominasi generasi milenial dan generasi Z yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Kedua kelompok ini disebut berpotensi untuk menciptakan partisipasi yang positif sehingga mendorong peralihan politik yang lebih inklusif di masa mendatang, namun juga rentan terhadap apatisme politik dan pengaruh media digital (Azhar, Sutiana, & Tresnayadi, 2024)..

Terwujudnya pemilu yang berjalan secara demokratis ini tak terlepas dari eksistensi KPU Kota Jakarta Selatan dan komponen pemilu lainnya yang memainkan peran penting dalam mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih. KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 memiliki tanggung jawab dalam mendorong partisipasi pemilih dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melalui pendidikan politik, memberikan informasi terkait undang-undang yang berlaku, membangun hubungan kerja sama yang harmonis dengan desk pemilu, serta memberikan kesempatan yang setara pada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemilu. KPU Kota Jakarta Selatan tentunya menggunakan strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan angka partisipasi.

Strategi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan landasan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu (Effendy, 2008). Dalam politik, strategi dirancang secara sistematis oleh para aktor politik untuk mencapai tujuan politiknya, seperti KPU Kota Jakarta Selatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tanpa adanya strategi yang baik, perubahan-perubahan yang ingin diciptakan dalam politik akan sulit terwujud. Peter Schroder membagi strategi politik menjadi dua yaitu, strategi ofensif dan strategi defensif (Schroder, 2009). Strategi ofensif dalam pemilu terbagi dalam strategi perluasan pasar dan menembus pasar, sedangkan strategi defensif terbagi dalam strategi mempertahankan pasar dan melepas pasar.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya strategi yang adaptif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan tinjauan literatur. Penelitian oleh (Zulkarnaen, Adara, Rahmawati, Wartadiayu, & Pamungkas (2020) yang bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat partisipasi generasi milenial pada pemilu di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki potensi besar sebagai kelompok pemilih, namun ditemukan juga tantangan seperti kemajuan teknologi dan disinformasi yang kerap mempengaruhi pilihan mereka. Sementara itu, penelitian selanjutnya oleh Fitri, Rohmah, & Ayu (2024) yang berfokus pada strategi komunikasi KPU Kota Semarang dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi Z sebagai pemilih muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dan kampanye kreatif seperti #temanpemilih terbukti membantu meningkatkan keterlibatan generasi muda. Selain itu, terdapat penelitian oleh (Haqqi & Dipokusumo, 2020) untuk menganalisis program pendidikan politik yang sistematis dapat memperkuat partisipasi politik pemuda melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi, dimana strategi ini berhasil meningkatkan potensi partisipasi pemuda. Ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dan strategi komunikasi penting dalam meningkatkan partisipasi kelompok milenial dan Gen Z.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian terdahulu, terdapat celah penelitian sehingga penulis melakukan pengembangan dengan pemilihan lokasi penelitian, teori yang digunakan, dan masalah penelitian yang lebih kompleks untuk menghasilkan

kontribusi baru. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek pendidikan dan komunikasi secara umum di daerah non metropolitan. Belum banyak penelitian yang secara khusus bagaimana strategi yang harus dijalankan di wilayah urban seperti Jakarta Selatan dengan karakteristik masyarakat yang modern, mobilitas yang tinggi, serta penetrasi teknologi yang luas. Selain itu, penulis juga akan berfokus kepada peran strategis KPU Kota Jakarta Selatan sebagai aktor utama dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Penulis juga berfokus pada teori strategi politik oleh Peter Schroder yang menjadi teori kunci untuk menjelaskan bagaimana KPU Kota Jakarta Selatan merancang dan mengeksekusi tindakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik. Hal ini terkait dengan program-program yang dibentuk, penggunaan media komunikasi, serta kerja sama dengan komponen politik lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama yakni “Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Tahun 2024 di Kota Jakarta Selatan?”. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis lebih jauh peran KPU Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengidentifikasi strategi yang diterapkan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks sosial-politik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan politik masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, serta aktif dalam kegiatan politik. Secara keseluruhan, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara strategi politik, pendidikan pemilih, serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu berdampak terhadap praktik pemilu mendatang.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis deskriptif. Menurut Brewer dan Hunter, penelitian kualitatif secara inheren akan fokus pada penggunaan beragam metode atau triangulasi yang menjadi upaya peneliti dalam memperoleh pemahaman mendalam terkait fenomena yang sedang dikaji (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Penulis menggunakan penelitian kualitatif agar dapat fokus pada pengembangan teori berdasarkan data empiris yang diperoleh. Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena peran strategis KPU Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Data yang penulis gunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi non partisipatif yang melibatkan delapan informan kunci dan pendukung yang dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan informan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan informasi yang kredibel, juga melihat keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 (Sugiyono, 2007). Informan tersebut terdiri atas Ketua KPU Kota Jakarta Selatan; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Selatan; Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas KPU Kota Jakarta Selatan; Staff Divisi Hukum dan Advokasi Komunitas Pemuda Partisipatif (Koperatif); Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem); serta tiga orang pemilih. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti laporan resmi pemerintah, arsip kegiatan, publikasi KPU, serta literatur akademis yang relevan dengan penelitian. Proses analisis data dengan model analisis oleh Miles & Huberman (1994) dilakukan dalam beberapa tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi

data, penulis menyeleksi data yang relevan dengan peran KPU Kota Jakarta Selatan. Berbagai hasil wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema terkait bentuk strategi sosialisasi yang dilakukan dan kendala yang dihadapi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dan naratif untuk memperlihatkan pola dan hubungan antara strategi yang dijalankan KPU Kota Jakarta Selatan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan secara menyeluruh guna menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan baik dari internal maupun eksternal KPU Kota Jakarta Selatan, serta meninjau kesesuaian antara data lapangan dan dokumen pendukung. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terkait peran KPU Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024.

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Sosialisasi Langsung oleh KPU Kota Jakarta Selatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan satu dari lima wilayah administrasi di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang menarik. Jakarta Selatan memiliki luas wilayah sekitar 141 km² yang terdiri dari 10 kecamatan dengan total 65 kelurahan dan menjadi kota dengan jumlah populasi terbesar ketiga di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebesar 2.235.606. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya mencerminkan kompleksitas pada sosial, ekonomi, politik, hingga budaya masyarakat Jakarta Selatan yang sangat beragam. Kota Jakarta Selatan dikenal memiliki beberapa pemukiman elit seperti Kemang, Pondok Indah, dan Kebayoran Baru, serta wilayah padat penduduk dan mobilitas tinggi seperti Tebet, Mampang, dan Pasar Minggu. Selain itu, Jakarta Selatan menjadi kawasan yang berkembang sebagai pusat perdagangan karena memiliki banyak pusat perbelanjaan besar. Jakarta Selatan juga memiliki bagian penting dari kawasan Segitiga Emas yang dikenal sebagai pusat kegiatan bisnis dan perkantoran yang dibentuk oleh tiga jalan utama yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Rasuna Said (Fathaniah Latala, Situmorang, & Muhammad Taki, 2022). Adanya karakteristik ini mencerminkan bahwa strategi harus mampu dikembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial agar dapat diimplementasikan secara efektif (Christian, 2020).

Dari konteks pemilu, tercatat sebanyak 1.766.049 jiwa yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu tahun 2024 yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan. Tingginya angka pemilih ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi KPU Kota Jakarta Selatan dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih karena strategi yang diciptakan harus mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua KPU Kota Jakarta Selatan menyampaikan bahwa karakter berbeda disetiap wilayah inilah yang menjadi dasar bagi KPU Kota Jakarta Selatan dalam membentuk strategi yang efektif. Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh KPU Kota Jakarta Selatan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi langsung (*face to face approach*) ke masyarakat. Sosialisasi sendiri merupakan kegiatan yang berupaya untuk menanamkan nilai-nilai politik dan menunjukkan cara bagaimana caranya berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk pada pemilu (Rahman, 2018). Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 4 dikatakan bahwa KPU memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU RI membuat target partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 79,5% secara nasional sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Zefanya et al., 2025).

Strategi sosialisasi secara langsung dianggap lebih efektif karena memungkinkan adanya interaksi dua arah antara KPU dengan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Alqoroni, Sriati, & Taqwa (2025) bahwa sosialisasi secara langsung (tatap muka) dengan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik karena suasana yang berjalan lebih interaktif. Strategi sosialisasi langsung sangat diperlukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan untuk memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran pemilih mengenai pentingnya hak pilih. Strategi ini menjadi bagian penting dari pendekatan ofensif, dimana lembaga politik seperti KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan strategi yang proaktif untuk memperluas jangkauan atau pengaruhnya, membentuk persepsi publik yang positif, serta meningkatkan keterlibatan politik masyarakat melalui pendekatan secara langsung (Schroder, 2009). Strategi ofensif kemudian dibagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar.

Strategi perluasan pasar tujuannya untuk membentuk ceruk basis pemilih baru, namun basis pemilih lama akan tetap hadir. Dalam rangka memperluas pasar, langkah awal yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Jakarta Selatan adalah berkoordinasi dengan Kesra dan Partisipasi Masyarakat (Kasih Kesra) yang merupakan salah satu bagian dari pemerintah tingkat kota. Kasih Kesra ini yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemetaan terhadap masyarakat baik kelompok masyarakat pemula, muda, perempuan, hingga masyarakat marginal atau rentan (penyandang disabilitas, warga berpenghasilan rendah, warga non domisili). Melalui hasil pemetaan tersebut, KPU Kota Jakarta Selatan mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang beresiko rendah partisipasi. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan strategi sosialisasi secara lebih efektif karena berbasis kondisi sosial yang aktual di wilayah Jakarta Selatan. Dalam penelitian Ridwan & Wibowo (2022) dikatakan bahwa analisa situasi dan fakta-fakta di lapangan diperlukan untuk mengukur tingkat kekuatan dan kelemahan strategi yang akan diterapkan.

Sejumlah agenda sosialisasi telah ditetapkan berdasarkan target sasarannya, diantaranya (1) Sosialisasi berbasis forum warga dengan target adalah masyarakat umum, (2) KPU Goes to School dengan target sasaran pemilih muda atau pemula, (3) Sosialisasi di panti sosial, sekolah disabilitas, hingga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan target kelompok marginal, (4) Sosialisasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan dengan target partai politik, komunitas pemuda, dan organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan ini telah dilangsungkan oleh KPU Kota Jakarta Selatan mulai tahun 2020 hingga 2024 sebagai persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Melalui program sosialisasi, KPU Kota Jakarta Selatan dapat memberikan penjelasan yang lebih detail, mendengarkan secara langsung masyarakat, serta menjadi media untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Program utama dari sosialisasi langsung KPU Kota Jakarta Selatan adalah *KPU Goes to School/Campus* yang menyasar pemilih muda yang berpotensi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik di wilayah Jakarta Selatan. Sebab pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan didominasi pemilih muda yang mencapai angka sekitar 52% atau sebanyak 897.664 pemilih dari total pemilih dan 72.903 diantaranya adalah pemilih pemula. Oleh sebab itu dengan segala potensi dan waktu yang tersedia, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam wawancara mengatakan pihaknya berhasil menggelar lebih dari 50 kegiatan sosialisasi secara langsung terutama menyasar ke sekolah, kampus, maupun pesantren untuk mengatasi ketidaktahuan pemilih muda dengan pendekatan yang edukatif. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara langsung

di sekolah-sekolah difabel, panti sosial, dan lapas untuk memberikan informasi mengenai pemilu. Menurut keterangan Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik KPU Kota Jakarta Selatan, kegiatan sosialisasi yang telah terselenggara menarik kehadiran lebih dari 10.000 peserta yang merupakan pemilih di wilayah Jakarta Selatan.

KPU Kota Jakarta Selatan juga berhasil menyelenggarakan event besar seperti “Jaksel Gen-Z and Millenial Conference” yang bertujuan untuk mengajak pemilih pemula dan muda untuk memahami semua hal yang terkait dengan pemilu. Acara yang dikemas dengan memadukan antara pendidikan pemilih dan talkshow ini mampu menghadirkan 400 peserta yang terdiri dari generasi Z dan milenial di Jakarta Selatan. Sementara kegiatan sosialisasi lainnya juga turut dilaksanakan di ruang publik seperti pada Car Free Day, lingkungan kelurahan, lingkungan KPU, pusat perbelanjaan, hingga pasar tradisional sendiri turut menjadi wadah untuk berdialog bersama masyarakat hingga partai politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilih bahwa mereka turut aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Selatan, baik di lingkungan kampus ataupun tempat tinggal mereka. Informasi-informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi sangat membantu mereka untuk membuat keputusan yang objektif dalam memilih dan mengetahui apa saja yang harus diperhatikan terkait pemilu tahun 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Helen Ardhana (Staf Divisi Hukum dan Advokasi Koperatif) selaku narasumber dalam kegiatan sosialisasi KPU Kota Jakarta Selatan menyatakan melihat antusiasme yang besar dari para pemilih saat berkeliling ke beberapa sekolah. Namun menurutnya pengetahuan pemilih muda saat itu terbatas pada kewajiban konstitusional saja. Untuk itu, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan banyak menekankan hal-hal teknis dan juga legalitas pemilu itu sendiri, dimana banyak aturan main yang harus diketahui masyarakat agar tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi tetapi juga perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Hal ini sehubungan dengan *civic voluntarism model* yang menjadi premis dasar bahwa keterlibatan politik harus mensyaratkan adanya *civic skill*. Tujuan dari kegiatan sosialisasi pada dasarnya tidak hanya menyadarkan para pemilih untuk ikut dalam proses pencoblosan saja, tetapi juga membekali mereka dengan *civic skill*. Dengan *Civic skill* ini, pemilih memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, hingga menentukan pilihan politiknya secara bijak (Wijaya & Suharno, 2025).

Selain melalui strategi perluasan pasar, KPU Kota Jakarta Selatan Juga menetapkan strategi menembus pasar yang fokusnya adalah untuk meningkatkan frekuensi keterlibatan dari pemilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (Pulungan, Rahmatunnisa, & Herdiansah, 2020). Dalam hal ini, KPU Kota Jakarta Selatan banyak melakukan evaluasi untuk Kecamatan Setiabudi dan Kebayoran Baru yang dinilai partisipasinya masih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas diketahui bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki banyak pendatang. Untuk itu, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan adalah dengan *straight to the point* atau disampaikan secara garis besar bahwa pencoblosan dilakukan pada 14 Februari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak menyita waktu mereka yang kebanyakan adalah warga dengan mobilitas tinggi dengan jadwal yang padat. Langkah ini sejalan dengan perencanaan strategi politik menurut Schroder, dimana strategi dikembangkan dari kelemahan yang telah diidentifikasi sehingga menghasilkan solusi yang seefektif mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Ridwan & Wibowo, 2022). Dengan demikian, KPU kota Jakarta Selatan terlihat menggunakan strateginya dengan lebih fleksibel berdasarkan karakter dari setiap wilayah yang juga menjadi dasar dalam membentuk strategi.

Secara keseluruhan, kinerja dari penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan sosialisasi atau pendidikan politik di masyarakat menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemilu (Shofa, Widiarti, & Lestari, 2024). KPU Kota Jakarta berhasil menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengubah perilaku politik masyarakat di wilayahnya menjadi lebih partisipatif dengan pendekatan politik yang ofensif melalui strategi sosialisasi secara langsung. Sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka ini masih menjadi elemen vital dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih bahkan di era digital sekalipun. Hal ini dikarenakan interaksi politik langsung memungkinkan timbulnya kedekatan emosional, umpan balik langsung, serta membangun kepercayaan antara KPU sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan sehingga menciptakan efek yang positif terhadap partisipasi pemilih (Efendi, Muktiyo, & Hastjarjo, 2015). Sosialisasi tatap muka yang terlaksana tidak hanya sebagai proses transfer informasi, tetapi juga proses mempertahankan legitimasi dan membangun komitmen dari penyelenggara pemilu di masyarakat yang cukup skeptis terhadap politik formal. Dengan demikian, strategi sosialisasi langsung telah menjadi pondasi penting dari upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 dengan efektif, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

2. Strategi Digital dan Media Sosial oleh KPU Kota Jakarta Selatan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola partisipasi politik masyarakat. Sejalan dengan pandangan Coleman & Freelon bahwa adanya politik digital tidak hanya mendukung tindakan yang telah ditentukan tetapi juga juga melahirkan partisipasi baru yang lebih interaktif, deliberatif, dan berorientasi pada jaringan sosial (Herwanto & Febrianti, 2025). Dalam konteks pemilu tahun 2024, KPU Kota Jakarta Selatan mengembangkan strategi digital dan media sosial sebagai bagian integral dari program sosialisasi dan pendidikan pemilih menjelang pemilu tahun 2024. Strategi digital juga merupakan bentuk dari pendekatan strategi politik ofensif yang berorientasi pada perluasan jangkauan audiens dan inovasi dalam komunikasi publik (Schroder, 2009). KPU Kota Jakarta Selatan menyadari pentingnya pemanfaatan ruang digital untuk melakukan peningkatan intensitas komunikasi dan menjadikannya sarana yang efektif untuk menjangkau kelompok pemilih yang aktif di media sosial terutama pemilih muda. Jakarta Selatan yang didominasi oleh pemilih muda membuat mereka menjadi segmen yang sangat penting dalam penyusunan strategi oleh KPU Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kehadiran mereka di TPS menjadi potensi besar bagi dalam mengubah masa depan bangsa karena cenderung kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam hal ini, pemanfaatan media sosial tidak hanya berperan memberikan akses informasi secara luas, menyampaikan aspirasi, dan memberikan pendidikan kepada pemilih. Media sosial secara tidak sadar dapat mempengaruhi dan menggiring masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik terutama memberikan suara dalam pemilu.

Strategi digital oleh KPU Kota Jakarta Selatan diterapkan melalui media yang dimilikinya, diantaranya Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok, serta website resmi KPU Kota Jakarta Selatan. Menurut informasi Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, terdapat target yang ditetapkan terkait informasi yang dipublikasikan melalui media sosial KPU Kota Jakarta Selatan, yakni minimal terdapat satu konten informatif dan kreatif yang diunggah di setiap harinya. Konten yang diunggah berisi informasi tentang kepemiluan, seperti infografis tahapan dan jadwal pemilu, tata cara pemilihan, peserta pemilu yang perlu diketahui, serta ajakan-ajakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Selain itu, KPU Kota Jakarta Selatan dalam websitenya selalu mempublikasikan produk hukum hingga berita-berita terbaru terkait

isu pemilihan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dengan keterbukaan informasi, serta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap berita-berita hoax terkait pemilu tahun 2024. KPU Kota Jakarta Selatan juga selalu menghimbau masyarakat Jakarta Selatan untuk selalu mengecek secara aktif status hak pilihnya secara digital melalui situs lokal www.js-kompakmemilih.com yang turut menjadi bukti nyata penerapan strategi berbasis digital.

Seluruh informasi yang dipublikasikan pada media sosial KPU Kota Jakarta Selatan telah membantu masyarakat yang mungkin tidak dapat mengikuti sosialisasi secara langsung karena kesibukannya tetap mendapatkan informasi yang diperlukan. Seperti disampaikan oleh para pemilih dalam wawancara bahwa selain melalui sosialisasi langsung, mereka juga banyak mencari informasi lebih dalam terkait pemilu melalui media sosial terutama terkait cara menggunakan hak suara agar tidak bingung pada hari pemungutan suara. Sebagaimana dinyatakan dalam (Verba, Schlozman, & Brady, 1995) bahwa kelompok yang lebih percaya diri untuk aktif dalam politik cenderung memiliki lebih banyak sumber informasi termasuk melalui media sosial, serta motivasi yang tinggi terhadap isu-isu publik dibandingkan dengan kelompok yang mengalami kebingungan akibat kurangnya literasi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas bahwa pemanfaatan media sosial ini cukup efektif. karena banyaknya masyarakat yang aktif melihat setiap update ataupun postingan-postingan yang KPU Kota Jakarta Selatan sampaikan yang artinya cukup efektif sekali strategi ini di era digital saat ini terutama dalam menjangkau generasi Z. Penelitian oleh Fitri, Rohmah, & Ayu (2024) juga membuktikan bahwa KPU Kota Semarang berhasil mencapai 85% partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024, dimana salah satu strategi komunikasi yang diterapkan adalah kampanye digital dengan tagline #Temanpemilih yang dilakukan di semua sosial medianya dengan target utamanya generasi Z. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh KPU dapat meningkatkan kesadaran politik terutama pemilih muda secara signifikan, khususnya ketika konten yang disampaikan bersifat edukatif dan dikemas dengan pendekatan visual yang menarik.



Gambar 1. Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial KPU Kota Jakarta Selatan
(Sumber dari [instagram.com/jakselkpu](https://www.instagram.com/jakselkpu))

Strategi digital sendiri juga sejalan dengan teori *Two-Step Flow of Communication* (Teori Aliran Komunikasi Dua Tahap) yang dikemukakan oleh Katz dan Lazarsfeld mengenai pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak luas. Temuan tersebut menjelaskan bahwa penyebaran informasi dan pesan politik melalui media sosial tidak hanya terjadi dalam satu tahap saja yang langsung mempengaruhi individu, tetapi juga dapat disalurkan terlebih dahulu melalui perantara yang dapat disebut *opinion leaders* (Tambunan, 2018). Dalam konteks ini, biasanya konten yang disampaikan oleh KPU Kota Jakarta Selatan akan dibagikan kembali oleh kader atau relawan pemilu, figur lokal, komunitas hingga organisasi masyarakat di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki pengaruh terhadap pengikut di media sosialnya. Melalui *opinion leader* tersebut, informasi terkait pemilu tahun 2024 akan menjadi lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran, serta dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat dan efisien. Tidak hanya itu, masyarakat yang menerima informasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari proses penyebaran dengan membagikan ulang informasi tersebut di media sosialnya terciptanya *engagement* atau tingkat keterlibatan yang lebih besar lagi dan disebut sebagai *opinion followers* dalam pendekatan komunikasi dua tahap. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Ramanda, Ramadhan, Prananda, Putra, & Kumara (2025) bahwa komunikasi dua tahap efektif untuk menjangkau pemilih muda dan perkotaan dalam Pilkada Jawa Tengah, dimana para kandidat bekerja sama dengan *opinion leader*, seperti tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin komunitas untuk menyebarkan pesan politik.

Pemanfaatan ruang digital yang cukup baik dari KPU Kota Jakarta Selatan efektif menjangkau segmen pemilih yang luas dan menumbuhkan kesadaran politik yang berkelanjutan di tengah masyarakat perkotaan. Selain memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai wadah penyebaran informasi, KPU Kota Jakarta Selatan juga masih memanfaatkan media konvensional seperti poster, banner, maupun baliho untuk ditampilkan secara masif kepada masyarakat. Meskipun begitu, KPU Kota Jakarta Selatan juga menyadari masih terdapat rencana yang belum terealisasi dengan potensi yang besar dalam meningkatkan partisipasi yang lebih dalam. Disampaikan oleh Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas bahwa mereka berharap untuk pemilu tahun 2029 nanti dapat lebih apik lagi dalam digitalisasi yang tidak hanya terpaku pada media sosial tetapi juga media-media yang berbentuk digital. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan Billboard atau Videotron di tempat-tempat strategis yang belum terlaksana pada pemilu kemarin karena tidak adanya anggaran yang mendukung.

Secara keseluruhan di samping sosialisasi langsung, strategi digital juga menjadi langkah signifikan yang dijalankan oleh KPU Kota Jakarta Selatan menghadapi tantangan demokrasi modern yang semakin berbasis teknologi. Keunggulan dari strategi digital ini adalah memberikan fleksibilitas bagi masyarakat perkotaan dengan mobilitas yang tinggi terutama pemilih muda karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sebagai bagian dari strategi ofensif, strategi digital dan penyebaran informasi melalui media sosial berhasil menjadi alat pendukung atau penguatan terhadap kegiatan sosialisasi secara langsung (tatap muka) dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu.

3. Strategi Kolaboratif dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintahan oleh KPU Kota Jakarta Selatan

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara efektif di wilayah Jakarta Selatan, tentu KPU Kota Jakarta Selatan tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas internalnya saja. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan yang memiliki total 6.715 TPS yang tersebar di wilayahnya. Besarnya jumlah TPS ini

menuntut penerapan strategi, akses informasi, hingga fasilitas pemilu yang merata di seluruh wilayah administratif. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bahwa total internal KPU Kota Jakarta Selatan sendiri hanya berjumlah 25 orang, di samping besaran cakupan wilayah dan jumlah pemilih di Jakarta Selatan KPU Kota Jakarta Selatan harus membangun sistem kerja yang efisien dengan memaksimalkan SDM yang dimilikinya. Kondisi ini membuat KPU Kota Jakarta Selatan menyadari perlunya menjalin kolaborasi yang strategis lintas lembaga dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan instansi pemerintah kota. Strategi kolaborasi menjadi bentuk penerapan strategi politik defensif yang berfokus pada mempertahankan basis konstituen dan memperkuat legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu (Schroder, 2009). Strategi defensif dengan cara mempertahankan pasar bertujuan untuk mempertahankan pemilih yang telah aktif menggunakan hak pilihnya, serta memperkuat keyakinan dari pemilih musiman pada pemilu sebelumnya.

Dalam konteks pendidikan politik, KPU Kota Jakarta Selatan menjalin kerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 dan 2 Jakarta Selatan melalui program KPU *Goes to School/Campus* dan program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum karakter siswa. Kedua program tersebut juga bertujuan untuk menjadikan siswa, guru, dosen, dan mahasiswa sebagai mitra dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, KPU Kota Jakarta Selatan juga bekerja sama secara langsung dengan beberapa sekolah dan kampus, seperti SMA Bakti Mulya 400 dalam proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Melalui kerja sama ini, KPU Kota Jakarta Selatan hadir memberikan pendampingan hingga menyediakan perlengkapan pemungutan suara yang bertujuan untuk membiasakan siswa untuk memahami proses pencoblosan menjelang pemilu tahun 2024. Dalam penelitian (Darmawan & Syahrin, 2024) bahwa melaksanakan praktik simulasi pemilu ini mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi dinamika politik, serta menuntun mereka agar menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam pemilu yang sesungguhnya. Sejalan dengan pandangan Milbrath & Goel terkait partisipasi politik bahwa rangsangan politik, akan mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik (Ibrahim, 2022). KPU Kota Jakarta Selatan juga menjalin kerjasama dengan Universitas Trilogi dan Universitas Nasional untuk membentuk wadah pengembangan kader muda yang tidak hanya melekat politik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai anggota PPK, PPS, maupun KPPS.

Selain dengan lembaga pendidikan, KPU Kota Jakarta Selatan berkolaborasi dengan pemerintah kota, serta Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan melalui program Sekolah Kader Demokrasi. Program tersebut bertujuan untuk melatih memberi bekal kepada 190 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, para pemuda, dan organisasi kemasyarakatan agar memahami mekanisme pemilu dan pentingnya partisipasi publik. Program Sekolah Kader Demokrasi dibentuk juga sebagai wadah regenerasi SDM di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan khususnya untuk badan ad hoc (PPK, PPS, maupun KPPS).

Dari sisi keamanan dan pengawasan, Jakarta Selatan juga memiliki posko pemilu beranggotakan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan lain sebagainya yang dibentuk sebagai pusat komunikasi dalam memantau dan melaporkan permasalahan terkait dengan pemilu tahun 2024. Kolaborasi ini bukan hanya dalam aspek teknis pengamanan saja, tetapi juga dalam pencegahan pelanggaran dan penanganan potensi konflik di lapangan. Menjaga integritas pemilu dan mengantisipasi setiap potensi pelanggaran merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk mempertahankan basis pemilih. Strategi ini merupakan

bagian dari *defensive stabilization* atau mempertahankan kepercayaan publik melalui pengawasan yang sistematis (Schroder, 2009). Hasilnya selama pemilu tahun 2024, menurut data Bawaslu tidak ditemukan adanya dugaan maupun laporan pelanggaran pada saat proses pemungutan suara, serta tidak adanya kasus pemungutan suara ulang di wilayah Jakarta Selatan.

Dari sisi aksesibilitas dan kemudahan layanan publik, KPU Kota Jakarta Selatan beserta badan ad hoc di tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan (PPS) menyediakan *helpdesk* informasi dan posko layanan pindah memilih. (DPTb) bagi masyarakat yang tidak berdomisili sesuai KTP agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Jakarta Selatan bahwa setiap harinya terdapat sekitar 300-400 orang mengurus pindah memilih. Menariknya antusias masyarakat untuk mengurus pindah memilih di wilayah Jakarta Selatan telah berlangsung sejak H-30 dari tanggal pencoblosan yang artinya banyak masyarakat pendatang di Jakarta Selatan sadar bahwa mereka harus menggunakan hak suaranya.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 dan 2024 di Jakarta Selatan

Kecamatan	Pemilu Tahun	Pemilu Tahun
	2019	2024
Setiabudi	80%	80%
Keb. Baru	79,5%	80%
Keb. Lama	80,5%	80,5%
Cilandak	81%	82%
Pesanggrahan	80%	82%
Jagakarsa	82%	83,5%
Ps. Minggu	82%	82%
Pancoran	82%	82%
Mampang	82%	82%
Tebet	83%	82%

(Sumber diolah dari kpu-jakartaselatankota.go.id)

Terlihat pada Tabel 3 bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang cukup signifikan pada sejumlah kecamatan di wilayah Jakarta Selatan pada pemilu tahun 2024. KPU Kota Jakarta Selatan berhasil memenuhi target mereka dengan angka partisipasi di semua kecamatan di atas 80%. Tidak hanya mampu mempertahankan basis pemilih lama, tetapi KPU Kota Jakarta Selatan juga mampu menarik banyak pemilih baru untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Berdasarkan wawancara dengan peneliti dari Perludem menyatakan bahwa dengan melihat pada hasil partisipasi pemilih di Jakarta Selatan yang tinggi dapat diketahui usaha penyelenggara pemilu di tingkat kota sudah terbilang baik. Hal ini juga tentunya didukung oleh koordinasi yang berjalan efektif dengan lembaga pendidikan, pemerintah kota, Bawaslu, aparat keamanan, dan tentunya masyarakat yang terlibat menjaga proses demokrasi.

Kolaborasi KPU Kota Jakarta Selatan dengan berbagai lembaga tersebut mencerminkan *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash bahwa pentingnya kemitraan antar lembaga dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik ataupun program-program publik yang berdasarkan kesepakatan bersama (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022). Kolaborasi ini dapat terjadi akibat tuntutan yang melampaui kapasitas dan peran lembaga publik tunggal sehingga dibutuhkan interaksi antar lembaga yang terkait dalam kegiatan publik. Dalam hal ini, *collaborative governance* menjadi strategi KPU Kota Jakarta Selatan untuk mengatasi keterbatasan SDM dan mewujudkan tujuan politik bersama yakni meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah Jakarta Selatan. Pola kolaborasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan

peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan.

Sejalan dengan penelitian (Tambunan, 2018) yang menekankan bahwa sinergi komunikasi antar lembaga seperti KPU dan Bawaslu menjadi bagian terpenting dalam penyebaran informasi terkait proses pemilu. Sinergi tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berintegritas yang turut berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih. Hasil penelitian lainnya oleh (Arifianto, Hamdi, & Tjenreng, 2025) bahwa *collaborative governance* yang terjadi dalam Pemilu tahun 2024 di Bekasi berlangsung secara baik dan didukung dengan tingkat *awareness* yang tinggi pada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih, sehingga hasilnya tingkat partisipasi Pemilu di Kabupaten Bekasi tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor pendukung yang tak kalah penting termasuk bagi wilayah Jakarta Selatan. Disampaikan oleh peneliti Perludem bahwa seberapa sering pun materi yang disampaikan oleh KPU kepada masyarakat terkait pemilu, tetap membutuhkan keinginan masyarakat untuk berangkat ke TPS pada hari pemungutan suara. Faktor kesadaran masyarakat inilah yang dinilai sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi partisipasi pemilih di Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan KPU Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya bergantung pada efektivitas pelaksanaan teknis dan koordinasi internal, tetapi juga pada kemampuan lembaga ini membangun jejaring kerja lintas sektor yang berkelanjutan. Pola hubungan yang terjalin antara KPU, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah menggambarkan praktik tata kelola yang bersifat partisipatif dan inklusif. Penerapan strategi defensif melalui kolaborasi lintas lembaga telah menunjukkan bahwa KPU Kota Jakarta Selatan tidak hanya berhasil memperluas jangkauan sosialisasi, tetapi juga menjaga legitimasi publik dan stabilitas penyelenggaraan pemilu.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan KPU Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari penerapan strategi politik yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat perkotaan. KPU Jakarta Selatan mampu memadukan strategi ofensif untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan strategi defensif untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Pendekatan ganda ini membuat KPU tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga pada penguatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Strategi sosialisasi langsung seperti kegiatan seperti *Goes to School/Campus* hingga sosialisasi ke tingkat RT/RW menjadi faktor penting dalam membangun kedekatan emosional antara KPU Kota Jakarta Selatan dan masyarakat. Interaksi tatap muka menciptakan komunikasi dua arah yang memperkuat pemahaman warga mengenai pentingnya hak pilih sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. KPU Kota Jakarta Selatan dalam strateginya juga memanfaatkan media sosial melalui konten kreatif dan edukatif yang mampu berkontribusi positif dalam menjangkau segmen pemilih muda yang cenderung aktif di ruang digital. Melalui strategi ini pesan politik dapat menyebar lebih luas melalui media digital melalui peran *opinion leaders* dan mampu mendorong partisipasi masyarakat. Upaya ini bagian dari penerapan strategi politik ofensif yang berorientasi pada ekspansi pasar politik dan penciptaan basis partisipasi baru. Selain itu, strategi kolaboratif dengan lembaga pendidikan dan pemerintah kota menunjukkan pentingnya kerja sama lintas

sektor dalam membangun partisipasi politik yang inklusif. Dengan adanya strategi ini, KPU Kota Jakarta Selatan memastikan akses informasi dan fasilitas pemilu yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Kolaborasi ini merefleksikan pendekatan *collaborative governance* di mana sinergi antarlembaga mampu meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sejalan dengan strategi defensif yang berfungsi mempertahankan kepercayaan dan loyalitas politik yang telah ada. Secara keseluruhan, integrasi dari ketiga strategi tersebut menciptakan ekosistem demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Hasilnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di Jakarta Selatan mencapai 82% dan menjadi yang tertinggi di DKI Jakarta, sekaligus menunjukkan peran penting lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU Kota Jakarta Selatan untuk mendorong kesadaran politik warga negara melalui komunikasi yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan basis partisipasi baru tetapi juga mampu mempertahankan loyalitas politik yang telah ada bagi penyelenggara pemilu di masa depan.

Daftar Pustaka

- Alqoroni, M., Sriati, S., & Taqwa, R. (2025). Pengaruh Sosialisasi Politik oleh KPU Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kota Pagar Alam. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 11(1), 20–31.
- Arifianto, M. H., Hamdi, M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 5(1), 149–215.
- Azhar, N., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2024). Analysis of the Understanding and Political Awareness of New Voters in the 2024 Election: A Siyasah Dusturiyah Perspective. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9(2), 224–244.
- Bogja, R., Suhenti, L., Puadi, Hariyono, T., & Malonda, H. J. H. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilihan Umum: Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Christian, A. J. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Darmawan, W., & Syahrin, A. A. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Suara Demokrasi dalam Memperkuat Partisipasi Siswa melalui Pemilihan OSIS. *Jurnal Global Futuristik*, 2(2), 105–114.
- Efendi, P., Muktiyo, W., & Hastjarjo, S. (2015). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Partai Golkar dalam Memenangkan Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(3), 273–286.
- Effendy, O. U. (2008). *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fathaniah Latala, A., Situmorang, R., & Muhammad Taki, H. (2022). Perubahan Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Segitiga Kuningan, Jakarta Selatan. *Reka Ruang*, 5(2), 67–75.
- Fitri, A. N., Rohmah, S., & Ayu, A. S. (2024). Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang Dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 61–72.
- Haqqi, H., & Dipokusumo, G. (2020). Pendidikan Politik Dalam Rangka Penguatan Partisipasi Politik Pemuda. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1a).

- Herwanto, D. P., & Febrianti, D. (2025). Generasi Z di Era Politik Digital: Bagaimana Media Sosial Membentuk Kecemasan dan Antusiasme dalam Pilkada Bogor 2024. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 12(1), 196–205.
- Ibrahim, I. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi kasus di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 568–591.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Vol. 1). Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2).
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).
- Ramanda, R. B., Ramadhan, M. F., Prananda, M. R., Putra, D. W. P., & Kumara, R. H. A. (2025). Efektivitas Komunikasi Politik Digital dan Tradisional: Menyongsong Pilkada Jawa Tengah 2024. *JISSE: Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(2).
- Ridwan, R., & Wibowo, A. T. (2022). Strategi Politik H. Syamsuri Al Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Tahun 2019. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(2).
- Schroder, P. (2009). Strategi Politik (Politische Strategien). In A. Agoesman (Trans.), *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Shofa, G. Z., Widiarti, R. T., & Lestari, R. I. (2024). Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2(1), 112–120.
- Sugiyono, D. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Audiens. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 24–31.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. MA: Harvard University Press.
- Wijaya, D. M., & Suharno. (2025). Civic Skills dan Perilaku Memilih: Studi Campuran Pada Mahasiswa PPKn UNY Dalam Pemilihan Presiden 2024. *MEDIA AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 14 (03)(03), 863–877.
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2).